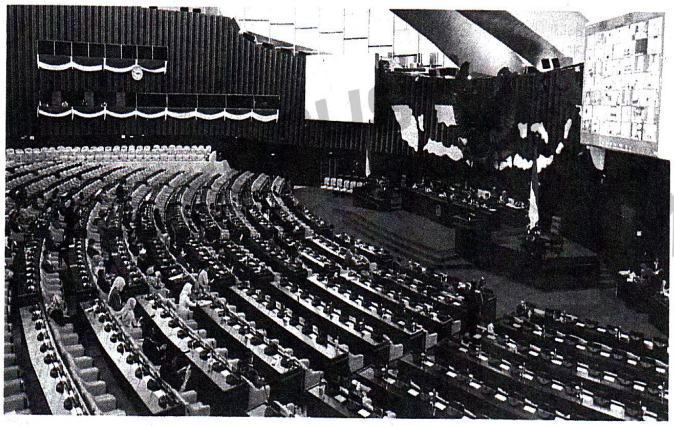
KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Apresiasi Kerja Sama Seluruh Komponen Bangsa
Tanggal : Selasa, 16 Juni 2020
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 3

Penanganan Covid-19

DPR Apresiasi Kerja Sama Seluruh Komponen Bangsa

[JAKARTA] Kerja sama komponen bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19 diapresiasi. Gotong royong tersebut dinilai membuat Indonesia mampu melawan Covid-19.



ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

Sejumlah anggota DPR menghadiri Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6). Rapat dihadiri 309 anggota, terdiri dari 227 orang secara virtual dan 82 secara fisik anggota hadir.

"DPR mengapresiasi kerja bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta segenap unsur masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 secara bergotong royong," kata Ketua DPR Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV DPR, di gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6).

Menurut Puan, semangat gotong royong itulah yang membuat Indonesia mampu menghadapi pandemi Covid-19 hingga saat ini. Hal itu akan tetap menjadi landasan untuk menuju transisi pada tatanan kehidupan normal baru atau *new normal*.

Rapat paripurna tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Para pimpinan fraksi dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hadir fisik di ruangan. Sementara anggota yang lainnya mengikuti rapat secara daring dengan tetap mematuhi persyaratan kuorum sesuai tata tertib persidangan.

Berdasarkan absensi, tercatat 82 orang anggota hadir fisik, sedangkan 227 Orang anggota hadir secara virtual, sehingga rapat memenuhi kuorum dengan jumlah total yang hadir 309 anggota DPR.

"Hari ini DPR melaksanakan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019–2020," ucap Puan.

Puan menambahkan, Masa Persidangan IV masih berada dalam situasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Rapat di DPR dilaksanakan dengan tetap mengikuti protap waspada Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan.

Dalam sidang itu, Puan mengungkap sejumlah agenda strategis pada Masa Persidangan IV DPR. Diharapkan, setiap agenda itu dapat diselesaikan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi.

Dikatakan, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, beberapa Rancangan Undang-Undang yang segera dibahas pada Pembicaraan Tingkat I antara lain RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, RUU tentang Cipta Kerja, dan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2020 terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi undang-undang (UU).

"Perppu ini penting untuk segera disikapi oleh DPR, karena merupakan dasar hukum pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020," kata Puan.

Menurut Puan, pelaksanaan fungsi legislasi di tengah pandemi Covid-19, membutuhkan komitmen bersama antara DPR dan Pemerintah. Tujuannya untuk tetap dapat mencapai target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

"Walaupun pelaksanaan rapat dilakukan dengan protokol Covid-19, DPR dan Pemerintah tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk menghasilkan produk undang-undang yang sesuai ketentuan-ketentuan pembentukan undang-undang," ucap Puan.

Puan menjelaskan mengenai pelaksanaan fungsi anggaran, DPR bersama pemerintah akan melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 merupakan landasan dalam mendesain APBN 2021.

Desain APBN 2021, sangat bergantung pada pemulihan Sosial dan Ekonomi pada tahun ini. "Desain APBN 2021 agar diarahkan untuk menjadi stimulus kebijakan fiskal dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial, serta menjadi momentum dalam melakukan berbagai reformasi kebijakan pembangunan sehingga dapat mempercepat kemajuan Indonesia diberbagai bidang," kata Puan.

Puan menyebutkan, dapat dimaklumi bahwa dalam mendesain APBN 2021, yang dilakukan dalam kondisi ketidakpastian akibat dampak pandemi Covid-19, akan menimbulkan banyak ruang antisipasi fiskal baik dari sisi pendapatan negara, belanja, maupun pembiayaan.

Oleh karena itu, KEM PPKF 2021 juga telah mengantisipasi risiko ketidakpastian perkembangan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Pengawasan

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan, akan melakukan rapat-rapat dengan mitra kerja maupun panitia kerja, khususnya dalam penanganan dampak wabah Covid-19 di berbagai bidang dan sektor.

Puan menegaskan, DPR melalui Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19, DPR akan melakukan pengawasan atas pelaksanan alokasi anggaran dan program penanganan Covid-19, termasuk mencermati efektivitas realokasi dan *refocusing* anggaran Covid-19 yang dilakukan di kementerian/lembaga terkait.

"Fungsi pengawasan DPR juga akan diarahkan pada upaya pemulihan sosial dan ekonomi yang akan dilakukan oleh Pemerintah, seperti antara pemulihan di bidang pendidikan dengan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh, Pemulihan Pariwisata, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan sebagainya," kata Puan.

Puan menyatakan, DPR akan memberikan perhatian pada tahapan persiapan Pilkada Serentak 2020. [MJS/C-6]